



LAPORAN PROYEK PERUBAHAN DESAIN TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Guna Membangun Kualitas
Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri

Abas Supriyadi S. Sos., M. AP

Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional,
Kepegawaian, dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja ASN
Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PROYEK PERUBAHAN
PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL TINGKAT II**

JUDUL :

***DESAIN TATA KELOLA
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GUNA MEMBANGUN KUALITAS
STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI***

Disusun oleh:

Nama : Abas Supriyadi, S.Sos, M.AP
NIP : 197412231996031001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
**Jabatan : Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional,
Kepegawaian, dan Sistem dan Prosedur serta
Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara**
Instansi : Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri
Kelas/Kelompok : A.1
Nomor Daftar Hadir : 22
Angkatan : XXVIII

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN PROYEK PERUBAHAN**

JUDUL : Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Guna Membangun Kualitas Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri

NAMA : Abas Supriyadi, S.Sos, M.AP

NIP : 197412231996031001

PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina (IV/a)

INSTANSI : Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri

JABATAN : Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian, dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara

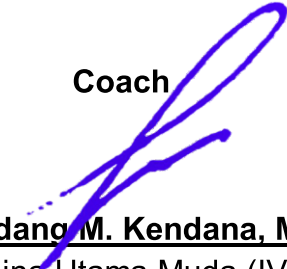
KELAS/KELOMPOK : A.1

NOMOR DAFTAR HADIR : 22


Disetujui diseminarkan pada Seminar Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII pada tanggal 7 Desember 2022 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Jakarta, Desember 2022

Coach


Drs. Edang M. Kendana, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196702131986031003

Mentor


Dr. Drs. Yusharto Huntayungo, M.Pd
Pembina Utama (IV/e)
NIP 196704291986021001

Mengetahui:
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan


Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

**BERITA ACARA
SEMINAR PROYEK PERUBAHAN**

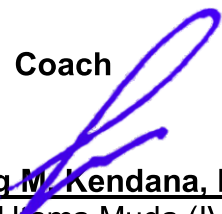
Pada hari : Rabu
Tanggal : 7 Desember 2022
Pukul : 11.00 WIB s.d 11.45 wib
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri

Telah diseminarkan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII.

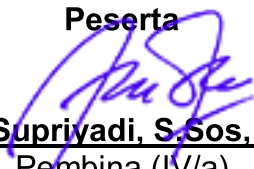
JUDUL : Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Guna Membangun Kualitas Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri
NAMA : Abas Supriyadi, S.Sos, M.AP
JABATAN : Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian, dan Sistem dan Prosedur serta Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara
KELAS/KELOMPOK : A.1
NOMOR DAFTAR HADIR : 22

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, *Mentor*, dan *Coach*.

Coach


Drs. Edang M. Kendana, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196702131986031003

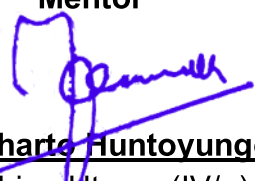
Peserta


Abas Supriyadi, S.Sos, M.AP
Pembina (IV/a)
NIP 197412231996031001

Penguji


Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

Mentor


Dr. Drs. Yusharto Huntayungo, M.Pd
Pembina Utama (IV/e)
NIP 196704291986021001

Mengetahui:
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan


Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

KATA PENGANTAR




Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas segala kekuatan, rahmat, dan karunia-Nya, Proyek Perubahan dengan judul “*Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Guna Membangun Kualitas Strategi Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri*” dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Bapak Dr. Eko Prasetyanto Purnomo Putro, S.Si., M.Si., MA., selaku Mentor awal yang telah memberikan ide penulisan tema proyek perubahan serta bimbingan dan pemikirannya kemudian Kepala BSKDN Dr. Drs. Yusharto Huntayungo, M.Pd selaku Mentor yang mendukung dan menyetujui penulisan proyek perubahan untuk dapat saya selesaikan; Bapak Drs. Edang M. Kendana, M.Si, selaku *Coach*; dan Ibu Dr. Kurniasih, SH, M.Si selaku Sekretaris Badan Litbang; atas segala dukungan, bimbingan, dan motivasinya kepada kami selama mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Widyaiswara BPSDM Kementerian Dalam Negeri yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang berharga; Panitia PKN Tingkat II Angkatan XXVIII Tahun 2022 yang selalu sigap memfasilitasi; seluruh Pejabat/Staf di lingkungan BSKDN Kemendagri dan kawan-kawan di Bagian PJKSE yang turut membantu.

Penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis bersedia menerima koreksi, kritik dan saran. Teriring doa khidmat kehadiran Allah SWT, kami sangat berharap Proyek Perubahan ini dapat disetujui oleh Penguji dalam Seminar Proyek Perubahan.

Jakarta, 7 Desember 2022
Peserta


Abas Supriyadi, S.Sos, M.AP
Pembina (IV/A)
NIP. 197412231996031001

DAFTAR ISI

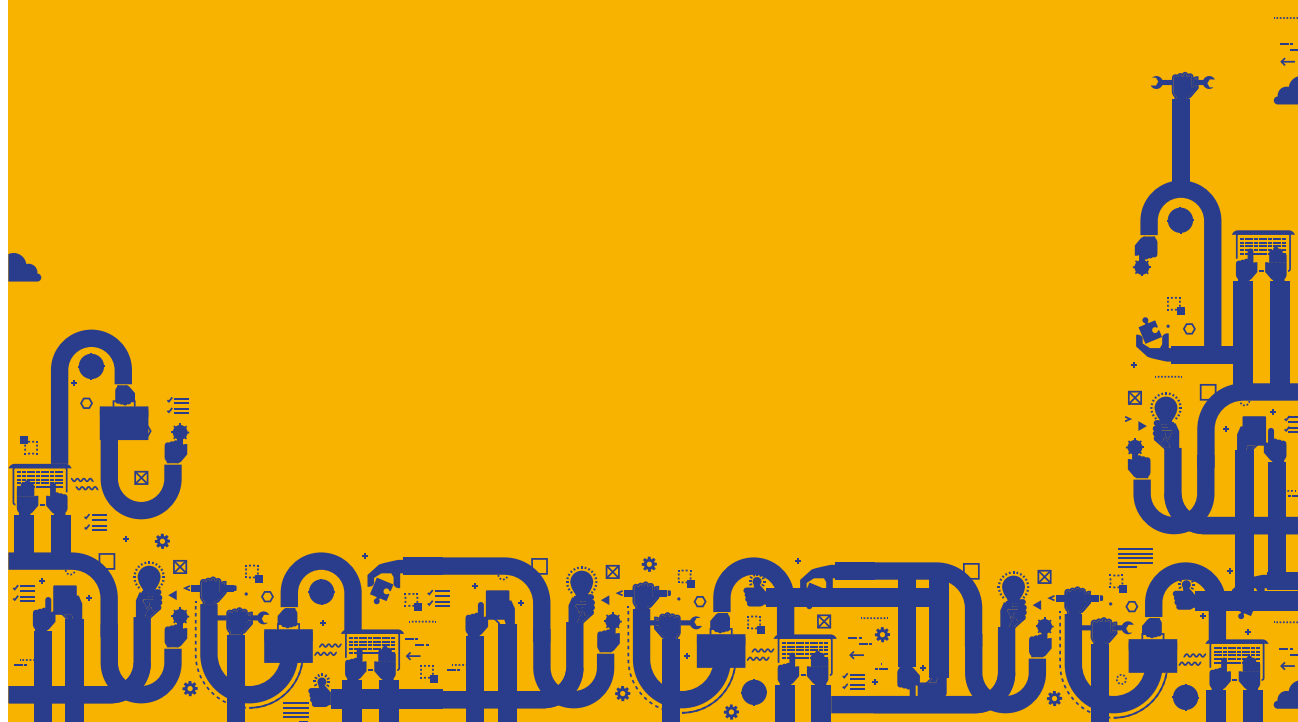
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PROYEK PERUBAHAN	ii
BERITA ACARA SEMINAR PROYEK PERUBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
Diskripsi Proyek Perubahan	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	3
BAB II RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN	5
A. Output Dan Outcome	5
B. Tahapan Rencana Pelaksanaan Kegiatan	5
C. Rencana Strategi Marketing	7
D. Strategi Marketing Proyek Perubahan	8
BAB III IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN	10
A. Capaian Tahapan Rencana Strategis	10
B. Implementasi Strategi Marketing	18
C. Pemberdayaan Organisasi Pembelajaran	24
BAB IV PENUTUP	28
A. Lesson Learned	28
B. Kesimpulan	28
C. Saran	29
LAMPIRAN	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram sebaran JFAK Kemendagri	2
Gambar 2. Dokumentasi Seminar Rancangan Proyek Perubahan	9
Gambar 3. Poster Digital Workshop	10
Gambar 4. Dokumentasi Workshop	11
Gambar 5. Dokumentasi Pembentukan Tim Kerja	12
Gambar 6. Dokumentasi Studi Kepustakaan	13
Gambar 7. Dokumentasi Konsinyasi	14
Gambar 8. Dokumentasi Konsinyasi	14
Gambar 9. Poster Digital Diseminasi	15
Gambar 10. Dokumentasi Diseminasi	15
Gambar 11. Dokumentasi Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri	16
Gambar 12. Dokumentasi Dukungan Proyek Perubahan	17
Gambar 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri	18
Gambar 14. Poster Digital Webinar	19
Gambar 15. Dokumentasi Webinar	19
Gambar 16. Flatform Instagram Abas Abdullah	20
Gambar 17. Flatform Instagram BSKDN Kemendagri	20
Gambar 18. Flatform Instagram Facebook Abas Abdullah	20
Gambar 19. Flatform Instagram Facebook Abas Abdullah	20
Gambar 20. Flatform Youtube BSKDN Kemendagri	21
Gambar 21. Flatform Youtube Abas Supriyadi	21
Gambar 22. Tim Efektif	23
Gambar 23. PNS Pengampu JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	23
Gambar 24. Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Desain Tata Kelola JFAK	24
Gambar 25. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif	24
Gambar 26. Struktur Tim Efektif	25
Gambar 27. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Manfaat Penerapan Proyek Perubahan	4
Tabel 2. Sasaran Jangka Pendek	6
Tabel 3. Sasaran Jangka Menengah	6
Tabel 4. Sasaran Jangka Panjang	6
Tabel 5. Identifikasi <i>Stakeholder Internal</i>	7
Tabel 6. Identifikasi <i>Stakeholder Eksternal</i>	7
Tabel 7. Strategi Marketing Proyek Perubahan	8
Tabel 8. Hasil Pembahasan Rumusan Desain Tata Kelola	14
Tabel 9. Rumusan Desain Tata Kelola	18
Tabel 10. Rilis Artikel di Beberapa Platform Media Online	22
Tabel 11. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif	26
Tabel 12. Struktur Tugas dan Kewenangan Tim Efektif	27



DISKRIPSI PROYEK PERUBAHAN

Kebijakan publik merupakan suatu instrumen bagi negara dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tantangan kebijakan di arus global kini semakin kompleks, penuh ketidakpastian, dan menghadapi kecepatan perubahan teknologi yang menakutkan. Kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam proses kebijakan publik memerlukan sumber daya yang berkompeten untuk mengawal proses dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, hingga evaluasi kebijakannya. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan (JFAK) merupakan salah satu jabatan fungsional yang strategis dan sangat menarik minat ASN pasca implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan diharapkan mampu membantu pembuat kebijakan dalam menghasilkan kebijakan publik yang inovatif, agile, dan berbasis bukti sehingga tidak lagi ditemukan kebijakan yang tumpang tindih ataupun menimbulkan reaksi negatif dari publik.

Saat ini di Kementerian Dalam Negeri terdapat 431 (empat ratus tiga puluh satu) Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan. Dengan jumlah Pejabat Analisis Kebijakan sebanyak itu dan besar kemungkinan kedepannya akan semakin bertambah, perlu kiranya dilakukan pengelolaan yang komprehensif untuk memberikan penguatan dari aspek administratif berupa data base profil analisis kebijakan dan penilaian angka kredit JFAK maupun aspek substantif berupa pengembangan karir dan kompetensi yang sejalan dengan ruang lingkup tugasnya. Pengelolaan tersebut tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri di Kementerian Dalam Negeri maupun LAN sebagai Instansi Pembina, namun membutuhkan kolaborasi dan sinergi kedua belah pihak untuk dapat merumuskan tata kelolanya. Sebagai Instansi Pembina, LAN berkepentingan untuk menjaga kualitas kompetensi yang dimiliki para pengampu JFAK sedangkan Kementerian Dalam Negeri mempunyai kepentingan mendapat rancangan kebijakan berkualitas yang disusun oleh JFAK. Kedua hal ini harus menjadi konsentrasi strategis dalam mengelola JFAK.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri kiranya perlu mengambil peran strategis dalam pengelolaan sumber daya JFAK. Selanjutnya sebagai unsur penunjang kelembagaan yang memiliki tugas menyusun, merumuskan dan memberikan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri, diperlukan optimalisasi JFAK yang ada di Kementerian Dalam Negeri melalui penataan mekanisme kerja menyesuaikan dengan pengaturan sistim kerja instansi pemerintah untuk penyederhaan birokrasi. Salah satu upaya yang coba dibangun adalah mendesain tata kelola jabatan fungsional analisis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui proyek perubahan yang kami usulkan.

BAB I PENDAHULUAN

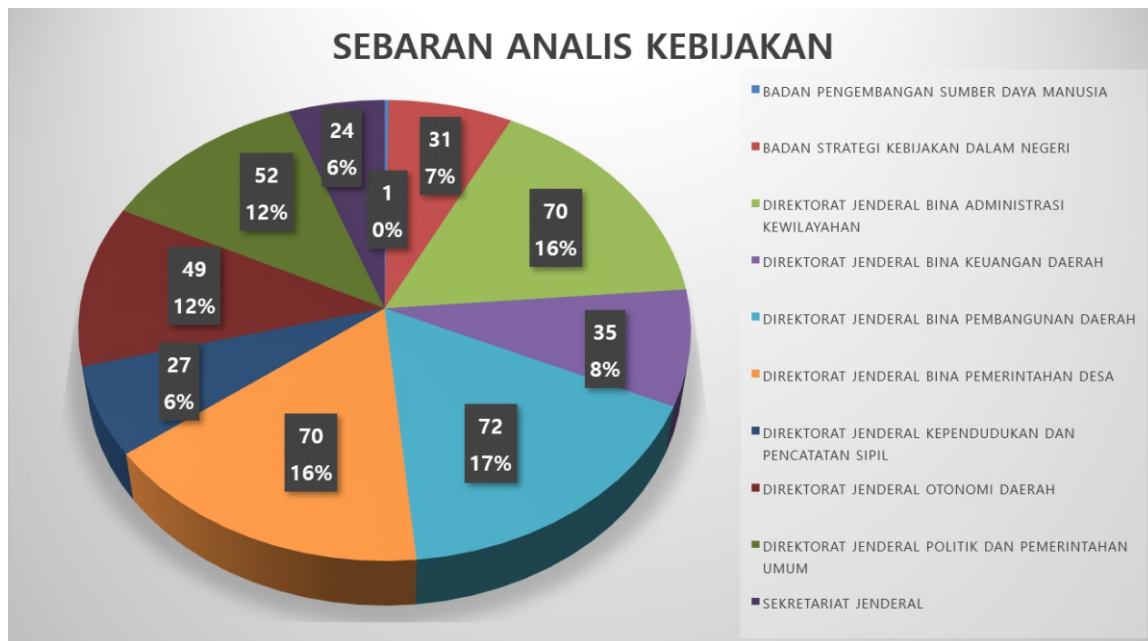
A. Latar Belakang

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri memiliki kepentingan untuk menemukan cara baru dalam proses bisnis penyusunan, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan yang berorientasi digunakannya hasil analisis kebijakan sebagai rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri. Penyusunan proses bisnis ini menjadi penting mengingat sebagai unsur penunjang harus mampu melakukan kolaborasi dengan seluruh UKE I yang ada di Kementerian Dalam Negeri bahkan Kementerian/Lembaga. Diharapkan dengan adanya proses bisnis yang jelas akan menjadi branding kelembagaan yang positif dalam mempublikasikan produk yang dihasilkan oleh BSKDN berupa rekomendasi strategi kebijakan.

Hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah dilaksanakan memberikan dampak signifikan bagi terbentuknya jabatan fungsional analis kebijakan yang mempunyai ruang lingkup tugas tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Dengan ruang lingkup demikian, tentunya sejalan dengan proses bisnis penciptaan rekomendasi strategi kebijakan. Hal inilah yang kiranya diperlukan penyusunan desain tata Kelola JFAK sebagai arah kebijakan tata Kelola JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dari data yang bersumber dari Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Dalam Negeri, sebaran JFAK tersebar hampir di seluruh UKE I sebanyak 431 orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman jabatan yang apabila dapat dioptimalkan kompetensinya akan berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan. Kompetensi jabatan yang dimiliki para pengampunya ternyata tidak sejalan dengan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dilaksanakan oleh BKN. Hasil pengukuran IP ASN Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 mendapat kategori sangat rendah dengan nilai 42,23. Hal ini rasanya secara faktual disebabkan kurangnya keaktifan para PNS untuk melakukan pembaruan data pengembangan kompetensi yang sudah dilaksanakan.

Begitupun dengan penilaian kualitas kebijakan yang dihasilkan, hasil evaluasi LAN dapat dijadikan rujukan, walaupun mungkin masih bisa diperdebatkan terkait dengan instrument yang digunakan dalam pengukurannya. Nilai Indeks Kualitas Kebijakan yang diperoleh pada tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri mendapatkan kategori kurang dengan nilai 32,87. Oleh karenanya optimalisasi sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya JFAK, merupakan keniscayaan yang harus dilakukan untuk mewujudkan strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri yang berkualitas.



Gambar 1. Diagram Setaraan JFAK Kemendagri

Dengan potret permasalahan tersebut, kondisi ideal yang diharapkan mampu mengoptimalisasi peran JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Penghitungan kebutuhan formasi dan distribusi JFAK disusun secara proporsional sesuai pembagian fungsi yang terdapat dalam organisasi (*Mintzberg model*). Hal ini dilakukan dengan menempatkan JFAK pada unit kerja yang menyelenggarakan fungsi tertentu (*techno-structure/BSKDN, supporting staf/Setjen, operating core/Ditjen*), untuk memastikan setiap fungsi organisasi berjalan dengan dukungan JFAK yang memadai sesuai dengan ruang lingkup tugas yang dimilikinya.
2. Reformulasi uraian tugas JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengaturan tata hubungan intern JFAK maupun dengan jabatan lainnya. Hal ini untuk mendukung penempatan JFAK pada unit kerja yang tepat dengan memperhatikan mekanisme kerja yang diatur dalam sistim kerja Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.
3. Sistim pengembangan karier, pengembangan kompetensi, dan penilaian kerja yang terintegrasi melalui optimalisasi teknologi informasi dengan memperhatikan mekanisme pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. Penajaman sistem seleksi internal melalui uji kompetensi berbasis substansi pemerintahan dalam negeri. Henry Simarora (2006:9) mengungkapkan bahwasanya "*Proses perekrutan terkait dengan tindakan dari mencari pegawai yang memenuhi syarat untuk mengisi kekosongan atau memegang posisi yang tersedia. Memilih orang yang tepat dan mampu untuk suatu posisi tertentu bukan hal yang mudah karena secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Penerapan sistem perekrutan yang handal dianggap sebagai titik awal dalam pengembangan sumber daya manusia. Ini mencakup penilaian pada pendidikan dan persyaratan keterampilan*

sebagaimana yang diharapkan, dan hal itu harus sesuai dengan kebijakan dan proses yang dirancang sesuai dengan iklim organisasi”.

5. Penunjukan UKE I lingkup Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator pengelolaan JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan mengadopsi Unit Pembina Internal JFAK selaku pengelola di Kementerian Keuangan.

Pengkondisian yang ideal tersebut, diharapkan mampu menjadi terobosan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi saat ini di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, antara lain :

1. Pengelolaan JFAK di Kementerian Dalam Negeri tidak secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional di Kementerian Dalam Negeri.
2. Belum adanya sinkronisasi butir kegiatan dan penilaian kualitas hasil kerja JFAK dengan uraian tugas jabatan dalam struktur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang disesuaikan dengan mekanisme kerja jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
3. JFAK hasil penyetaraan jabatan yang berjumlah 431 orang belum mendapatkan pelatihan fungsional dan pelatihan teknis yang diwajibkan untuk diikuti oleh JFAK, sesuai dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan.
4. Pelaksanaan uji kompetensi JFAK hanya dilakukan oleh Instansi Pembina dengan koordinasi antar Instansi secara administratif berupa pengusulan peserta berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Penilaian Kualitas Hasil Kerja Analis Kebijakan dan belum dikoordinasikan muatan substansi pemerintahan dalam negeri.
5. Belum terintegrasinya sistem penilaian kinerja (Sikerja) online dengan penilaian angka kredit JFAK. Penilaian angka kredit saat ini menggunakan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) berbasis google form <https://bit.ly/DUPAK-ANJAK-KEMENDAGRI>
6. Tim Penilai Instansi sesuai mandatnya hanya mempunyai tugas melakukan penilaian dan penetapan angka kredit.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan dari penyusunan rancangan proyek perubahan ini dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yang terdiri dari :

- a. Pengelolaan JFAK di Kementerian Dalam Negeri tidak secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional di Kementerian Dalam Negeri.
- b. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai dalam rentang waktu 7 (tujuh) bulan yaitu periode bulan Januari s.d Juli 2023 adalah Terumuskannya

rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

- c. Tujuan jangka pendek yang akan dicapai dalam rentang waktu 2 (dua) bulan yaitu periode bulan Oktober s.d November 2022 adalah Terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

2. Manfaat

Berbagai manfaat yang kiranya dapat dikontribusikan dari penerapan Proyek Perubahan ini antara lain:

BAGI PESERTA

- a. Bagi Peserta, yaitu:
- 1) Meningkatkan kemampuan manajerial, terutama melalui pembentukan Tim Kerja,
 - 2) membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholder, dan pengembangan kebijakan.
 - 3) Meningkatkan pemahaman tata kelola JFAK terkait dengan arah pengembangan dari Proyek Perubahan.

BAGI INSTITUSI (KEMENDAGRI DAN BSKDN)

- b. Bagi Institusi (Kemendagri dan BSKDN), yaitu:
- 1) Mengoptimalkan kinerja BSKDN Kemendagri yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Penilai Instansi JFAK Kemendagri.
 - 2) Mengoptimalkan kinerja BSKDN dalam mendukung terciptanya kebijakan yang berkualitas melalui pendayagunaan JFAK yang kompeten.
 - 3) Membangun kemitraan strategis dengan Instansi Pembina yang sekaligus dapat bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BSKDN.

Bagi Stakeholders (K/L, Eselon I terkait di Kemendagri)

- c. Bagi Stakeholders (K/L, Eselon I terkait di Kemendagri), yaitu:
- 1) Mendukung penerapan sistim kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi.
 - 2) Mendukung efektifitas penyusunan kebijakan dan program terkait target dan sasaran kinerja UKE I melalui pelibatan JFAK.
 - 3) Menyederhanakan prosedur manajemen JFAK lingkup Kemendagri.

Tabel 1. Manfaat Penerapan Proyek Perubahan

BAB II

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

Rancangan Proyek Perubahan ini telah disetujui oleh Mentor, Coach, dan Penguji dalam Seminar Rancangan Proyek Perubahan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 bertempat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dan dituangkan dalam Berita Acara Seminar Rancangan Proyek Perubahan.

A. Output dan Outcome

Dalam penyusunan proyek perubahan ini diharapkan menghasilkan output sebagai hasil kerja implementasi proyek perubahan di masing-masing tahapan sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagai output jangka pendek.
2. Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagai output jangka menengah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, sebagai output jangka panjang.

Dengan dihasilkannya output proyek perubahan, diharapkan outcome yang akan dicapai pada tahapan jangka panjang adalah terwujudnya tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri guna membangun kualitas strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri.

B. Tahapan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan yang akan dilaksanakan selama proses implementasi proyek perubahan terbagi dalam time-frame yang ditentukan dan disesuaikan dengan output kunci yang akan dicapai dalam jangka pendek sesuai tujuan proyek perubahan, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Jangka Pendek (Oktober s.d Desember 2022)

No.	Kegiatan	Sasaran	Waktu	Waktu
1	Penugasan Tim Kerja	Terbentuknya Tim Kerja	18 Oktober 2022	Kepmendagri
2	Penelitian Kepustakaan	Mendapatkan referensi pustaka, kajian dan dokumen kebijakan	18 Oktober 2022	Dokumen pustaka, kajian dan kebijakan
3	Studi banding dengan Kementerian Keuangan	Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman implementasi	18 Oktober 2022	Laporan Kegiatan
4	Konsinyasi	Menyusun rancangan Desain tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	18 Oktober s.d 28 Oktober 2022	Laporan Kegiatan
5	Focus Group Discussion (FGD)	Melakukan diskusi rancangan desain	31 Oktober 2022	Laporan Kegiatan
6	Konsinyasi penyusunan draf Rancangan Kepmendagri	Menyelesaikan Draft Rancangan Kepmendagri	November s.d 10 November 2022	Rancangan Kepmendagri
7	Diseminasi rancangan Kepmendagri	Mendapatkan masukan dan saran	14 November 2022	Laporan Kegiatan
8	Konsolidasi dukungan proyek perubahan	Mendapatkan pernyataan dukungan stakeholders	17 November 2022	Video dukungan stakeholders

9	Publikasi proyek perubahan	Melakukan publikasi melalui media online dan media sosial	21 November 2022	Flyer, konten media online, konten media sosial
10	Pendokumentasian hasil kegiatan proyek perubahan	Menghimpun semua dokumen kegiatan	1 Desember 2022	Foto, video, soft file dokumen, dll
11	Penyusunan Laporan Implementasi Proyek Perubahan	Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman implementasi	1 Desember s.d 5 Desember 2022	Laporan Implementasi Proyek Perubahan
12	Penandatanganan Kepmendagri tentang Desain Tata Kelola JFAK di Kemendagri	Penetapan Kepmendagri oleh Kepala BSKDN	5 Desember 2022	Kepmendagri

Tabel 2. Sasaran Jangka Pendek

2. Jangka Menengah (Februari s.d Juli 2023)

No.	Kegiatan	Sasaran	Waktu	Waktu
1	Rapat Koordinasi	Konsolidasi JFAK Kemendagri	Februari 2023	Laporan Kegiatan
2	Focus Group Discussion (FGD)	Diskusi tata kelola JFAK	Februari 2023	Laporan Kegiatan
3	Studi banding dengan Kementerian Keuangan	Mendapatkan pengetahuan dan pengalaman implementasi	Maret 2023	Laporan Kegiatan
4	Rapat Koordinasi	Penyusunan Rancangan Permendagri	April, Mei, Juni 2023	Rancangan Permendagri
5	Uji Publik	Mendapatkan masukan dan saran	Juni 2023	Laporan Kegiatan
6	Diseminasi	Menginformasikan substansi Ranpermendagri	Juli 2023	Laporan Kegiatan
7	Koordinasi dengan Biro Hukum	Mengusulkan Ranpermendagri dalam program penyusunan perundang-undangan	Juli 2023	Tercatat dalam Prosundagri

Tabel 3. Sasaran Jangka Menengah

3. Jangka Panjang (Agustus 2023 s. sd Agustus 2024)

No.	Kegiatan	Sasaran	Waktu	Waktu
1	Rapat Koordinasi dengan Instansi Pembina	Mendapatkan masukan konten substansi Rancangan Permendagri	Agustus 2023	Laporan Kegiatan
2	Harmonisasi	Hasil harmonisasi	Oktober 2023 s.d Februari 2024	Berita Acara
3	Koordinasi Penetapan	Pengundangan Permendagri	Agustus 2023	Permendagri

Tabel 4. Sasaran Jangka Panjang



C. Rencana Strategi Marketing

Stakeholder merupakan pimpinan/pejabat/individu yang mempunyai peran dan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pencapaian proyek perubahan. Identifikasi stakeholder dilakukan dengan pemetaan *stakeholder* yang terkait dengan implementasi proyek perubahan. Kemudian dibagi dalam 2 (dua) jenis meliputi *stakeholder internal* (dalam instansi BSKDN) dan *stakeholder eksternal* (diluar BSKDN) yaitu:

1. Stakeholder Internal

No.	Stakeholder Internal	Peran	Sikap Dukungan
1	Kepala BSKDN	- Mentor - Arahan - Instruksi	(+)
2	Sekretaris Badan	- Atasan langsung - Arahan - Dukungan kegiatan	(+)
3	Kepala Pusat Litbang Otda, Politik, dan Pemerintahan Umum;	Dukungan penguatan substansi	(+)
4	Kepala Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan;	Dukungan penguatan substansi	(+)
5	Kepala Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah	Dukungan penguatan substansi	(+)
6	Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah	Dukungan penguatan substansi	(+)
7	Kepala Bagian Umum	Dukungan teknis kegiatan	(+)
8	Kepala Bagian Perencanaan	Dukungan teknis kegiatan	(+)
9	Kepala Bagian Keuangan	Dukungan teknis kegiatan	(+)
10	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan BSKDN	Dukungan teknis kegiatan	(+)

Keterangan : Mendukung (+), Tidak Mendukung (-), Netral (+/-)

Tabel 5. Identifikasi *Stakeholder Internal*

2. Stakeholder Eksternal

No.	Stakeholder Eksternal	Peran	Sikap Dukungan
1	Kepala Lembaga Administrasi Negara	- Instansi Pembina - pertimbangan	(+/-)
2	Sekretaris Jenderal Kemendagri	Dukungan penguatan kebijakan	(+)
3	Direktur Jenderal Otonomi Daerah	Dukungan penguatan kebijakan	(+)
4	Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan	Dukungan penguatan kebijakan	(+)
5	Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum	Dukungan penguatan kebijakan	(+)
6	Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah	Dukungan penguatan kebijakan	(+)
7	Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Dukungan penguatan kebijakan	(+)
8	Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil	Dukungan penguatan kebijakan	(+)
9	Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan	Dukungan penguatan substansi	(+/-)
10	Kepala Biro Kepegawaian	Dukungan penguatan substansi	(+)
11	Kepala Biro Organisasi	Dukungan penguatan substansi	(+)
12	Kepala Biro Hukum	Dukungan penguatan substansi	(+)
13	Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan lingkup Kementerian	Dukungan penguatan substansi	(+)

Keterangan : Mendukung (+), Tidak Mendukung (-), Netral (+/-)

Tabel 6. Identifikasi *Stakeholder Eksternal*

Dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan proyek perubahan, maka diperlukan strategi pemasaran sektor publik yang tepat guna mendapatkan dukungan yang optimal dari berbagai macam *stakeholder*. Rencana strategi yang akan diterapkan pada proyek perubahan ini adalah *marketing mix - 4P1C (Product, Price, Promotion, Place, dan Customer)* dari Potter. Pemetaan elemen dalam pemasaran sektor publik pada proyek perubahan ini adalah sebagai berikut::



8

SEMINAR RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN



**BERITA ACARA
SEMINAR RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN**

Pada hari : Selasa
Tanggal : 11 Oktober 2022
Pukul : 11.00 - 11.45 WIB
Tempat : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri


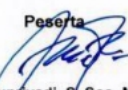
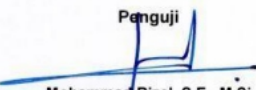

Telah diseminarkan Rancangan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional
Tingkat II Tahun 2022 Angkatan XXVIII

JUDUL : Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Guna Membangun Kualitas Strategi Kebijakan
Pemerintahan Dalam Negeri


DISUSUN OLEH : Abas Supriyadi, S. Sos, M. AP
JABATAN : Kepala Bagian Pembinaan Jabatan Fungsional,
Kepegawaian, dan Sistem dan Prosedur serta
Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara

KELAS/KELOMPOK : A.1
NOMOR DAFTAR HADIR : 22

Dan telah mendapatkan pengujian/saran/masukan/komentar dari Penguji, Mentor, dan
Coach.

<p>Coach</p>  Drs. Edang M. Kendana, M. Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196702131986031003	<p>Peserta</p>  Abas Supriyadi, S. Sos, M. AP Pembina (IV/a) NIP. 197412231996031001
<p>Penguji</p>  Mohammad Rizal, S.E., M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 196408171993031001	<p>Mentor</p>  Dr. Eko Prasetyanto P.P., S.Si., M.Si, MA Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19680604199631001

Mengetahui:
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi
Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan


Mohammad Rizal, S.E., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196408171993031001

Gambar 2. Dokumentasi Seminar Rancangan Proyek Perubahan

BAB III

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

A. Capaian Tahapan Rencana Strategis

Implementasi proyek perubahan merupakan tahapan bagi peserta PKN II untuk menguji kapasitas kepemimpinannya dalam melaksanakan rancangan proyek perubahan yang telah disusun dan telah mendapatkan persetujuan dari mentor termasuk hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan/stakeholders yang terlibat. Pada tahap ini, peserta perlu mengidentifikasi keunggulan dan kelemahannya dalam memimpin perubahan, dan mengumpulkan dokumen yang perlu dilaporkan dalam laporan implementasi proyek perubahan yang dilaksanakan.

Implementasi proyek perubahan merupakan capaian rencana strategis yang dihasilkan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Studi banding dengan Kementerian Keuangan

Studi banding dengan Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui beberapa kali pertemuan dengan perwakilan pejabat dari Badan Kebijakan Fiskal selaku Pembina Internal JFAK di lingkungan Kementerian Keuangan antara lain melalui forum workshop tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



Gambar 3. Poster Digital Workshop

2. Pembentukan Tim Kerja

Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dibentuk melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29-290 tanggal 29 September 2022 dan mulai melaksanakan tugas pada tanggal 18 Oktober 2022.

Dokumen Keputusan terlampir



Gambar 5. Dokumentasi Pembentukan Tim Kerja

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Desain Tata Kelola pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, bertempat di Perpustakaan Supardjo Rustam, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No.132 Jakarta Pusat.



Gambar 6. Dokumentasi Studi Kepustakaan

4. Konsinyasi penyusunan draf Rancangan Kepmendagri



Gambar 7. Dokumentasi Konsiyasi

Konsinyasi penyusunan draf Rancangan Kepmendagri dilaksanakan secara simultan mulai tanggal 1 s.d 10 November 2022 bertempat di Aula Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal.



Gambar 8. Dokumentasi Konsiyasi

Dari hasil pembahasan yang dilakukan diperoleh rumusan draft rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan ruang lingkup:

01	Tugas Pokok dan Kedudukan	05	Penugasan Pejabat Fungsional Analis	09	Tim Penilai Angka Kredit
02	Uraian Kegiatan	06	Pemantauan dan Evaluasi Penugasan	10	Penilaian Kinerja dan Penetapan Angka
03	Standar Kompetensi Jabatan	07	Pembentukan Kelompok Kerja	11	Pembinaan Karier
04	Penyusunan Rencana Kerja Unit	08	Penunjukan Unit Kerja Eselon I (UKE I) Sebagai Koordinator/Unit Pembina JFAK	12	Kode Etik

Tabel 8. Hasil Pembahasan Rumusan Desain Tata Kelola

5. Diseminasi Desain Tata Kelola JFAK AK Kemendagri



Gambar 9. Poster Digital Diseminasi

Diseminasi desain tata Kelola jabatan fungsional anlis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan pada tanggal 15 November 2022 bertempat di Hotel Orchardz, Jl. Industri Gunung Sahari Jakarta.

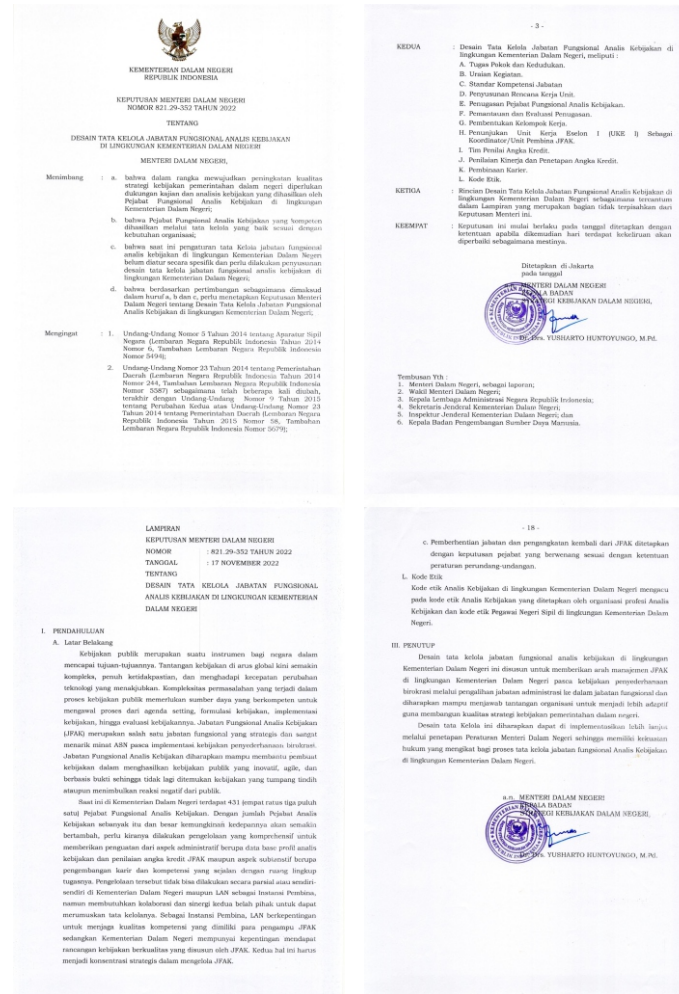


Gambar 10. Dokumentasi Digital Diseminasi

6. Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Desain Tata Kelola JFAK di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Proyek Perubahan yang digagas selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29 Tahun 2022 tentang Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 November 2022.

Dokumen Keputusan terlampir.

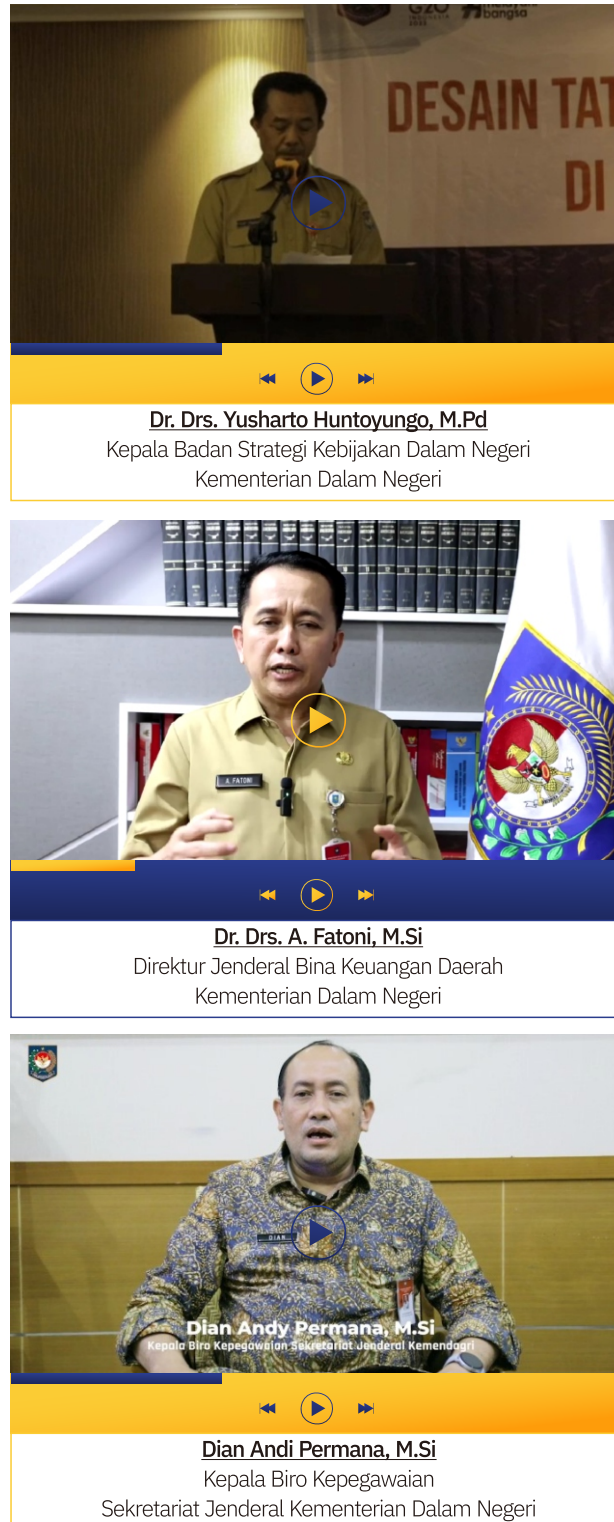


Gambar 11. Dokumentasi Penetapan Keputusan Menteri Dalam Negeri

7. Konsolidasi dukungan proyek perubahan

Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan testimoni dukungan dari beberapa pejabat terkait melalui rekaman video.

Dokumen Video terlampir.

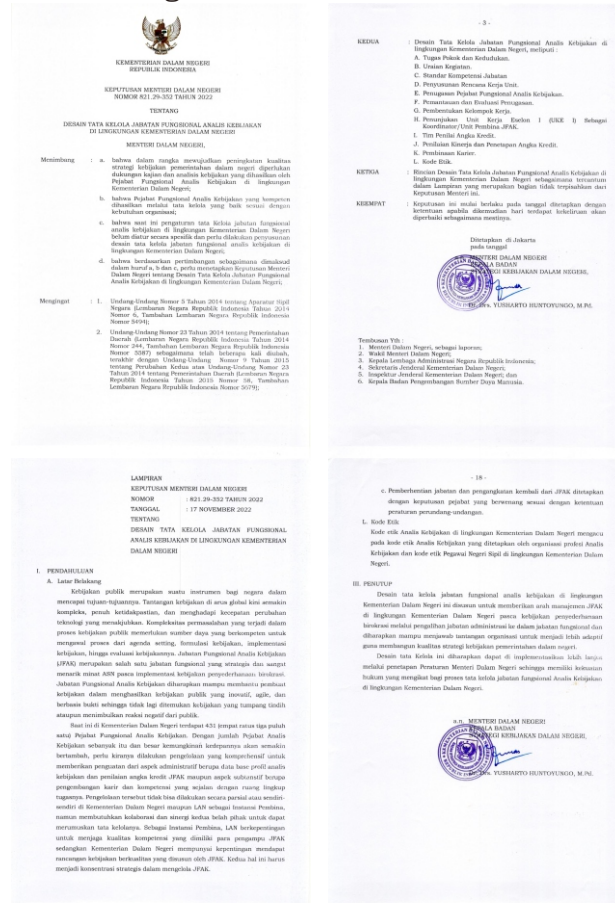


Gambar 12. Dokumentasi Dukungan Proyek Perubahan

B. Implementasi Strategi Marketing

1. Produk

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29 Tahun 2022 tentang Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



Gambar 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Muatan Rumusan Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, meliputi :



Tabel 9. Rumusan Desain Tata Kelola

2. Price

Pembiayaan pelaksanaan proyek perubahan bersumber dari DIPA Badan Litbang TA 2022 melalui Keputusan Menteri Dalam nomor 910-282 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 910-366 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Anggaran di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022.

3. Promotion

a. Promotion Webinar



Gambar 14. Poster Digital Webinar



Gambar 15. Dokumentasi Webinar

Webinar Kelembagaan Strategi Kebijakan diselenggarakan sebagai bagian dukungan promosi dari hasil proyek perubahan yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2022 bertempat di Aula Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri.

b. Media Sosial

1. Instagram



Gambar 16. Platform Instagram Abas.Abdullah

https://www.instagram.com/p/CIAOUWxJ7z9/?utm_source=ig_web_copy_link



Gambar 17. Platform Instagram BSKDN Kemendagri

https://www.instagram.com/reel/ClGmx1ygyy/?utm_source=ig_web_copy_link

2. Facebook



Gambar 18. Platform Facebook Abas Abdullah

[https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222541418107101&set=pcb.10222541423587238&_cft_\[0\]=AZWbMdMe326jHxXiTXZEMRne4Er2OmX4S13-e9SPNU0MbICav30ezxIAdZT3W8rscVnxEKM4zS6lGYy618bbM467y0xfHyoPePyJr76_ige2XTdxAgdwAuLJ-Y466-ejPz-eXGTxYWjWgOhFWIsvh2R6lx1fph2h002ki7mMScWiZ-LajaYdOs7IIh_bo-OZZNY&_tn_*=bH-R](https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222541418107101&set=pcb.10222541423587238&_cft_[0]=AZWbMdMe326jHxXiTXZEMRne4Er2OmX4S13-e9SPNU0MbICav30ezxIAdZT3W8rscVnxEKM4zS6lGYy618bbM467y0xfHyoPePyJr76_ige2XTdxAgdwAuLJ-Y466-ejPz-eXGTxYWjWgOhFWIsvh2R6lx1fph2h002ki7mMScWiZ-LajaYdOs7IIh_bo-OZZNY&_tn_*=bH-R)



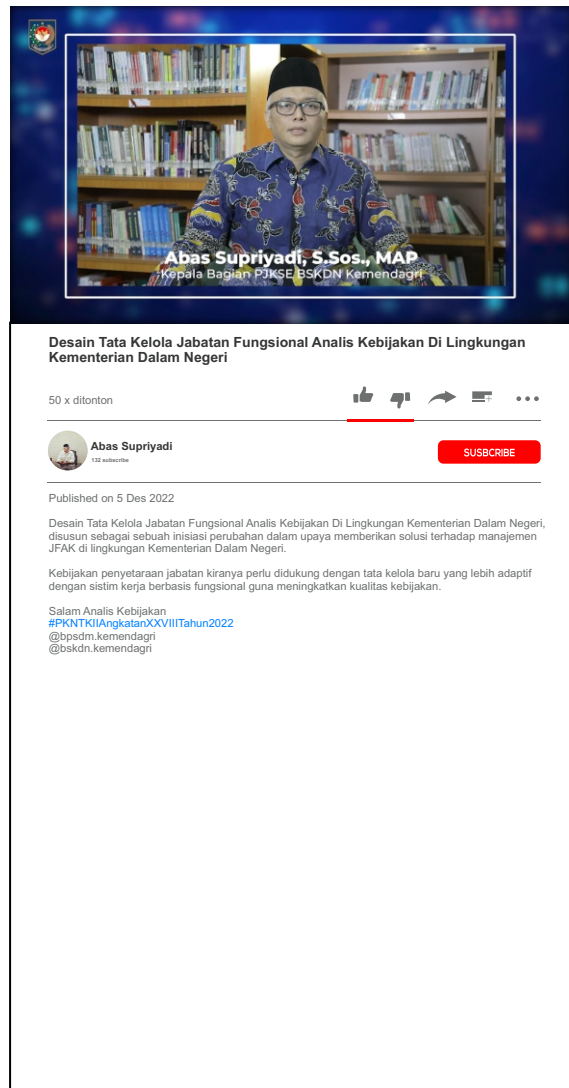
Gambar 19. Platform Facebook Abas Abdullah

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F reel%2FClGmx1ygyy%2F%3Figshid%3DMjMnZVkmJY%253D%26fbclid%3DIwAR1clAblhQ3BTmlZKbUHNz2_7TkKhTrGVu8g71f-S2iH950g4fN_zOHioS&h=AT3P3DVgl7YbMOTu7CORvSFuFHRPAWDLikt68Y1M-25_7oQvfJC2dD22nvdzQ-eeenyU_isoWy0ooCm73s4uOpV6hg0xW3j

3. Youtube



Gambar 20. Platform Youtube BSKDN Kemendagri
<https://www.youtube.com/watch?v=cfuMJHCYRws>



Gambar 21. Platform Youtube Abas Supriyadi
https://www.youtube.com/watch?v=p-nKDUPH_X8

c. Media Online



BSKDN Dukung Peningkatan Tata Kelola JFAK di Kemendagri
 Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Rabu, 16 November 2022 - 03:02 WIB oleh M Purwadi dengan judul "BSKDN Dukung Peningkatan Tata Kelola JFAK di Kemendagri". Untuk selengkapnya kunjungi:
<https://nasional.sindonews.com/read/942635/15/bskdn-dukung-peningkatan-tata-kelola-jfak-di-kemendagri-1668543092>

BSKDN: Sumber Daya Analisis Kebijakan Perlu Dikelola Maksimal
<https://www.jawapos.com/nasional/15/11/2022/bskdn-sumber-daya-analisis-kebijakan-perlu-dikelola-maksimal/>

Yusharto Tegaskan BSKDN Dukung Peningkatan Tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan
<https://m.jpnn.com/news/yusharto-tegaskan-bskdn-dukung-peningkatan-tata-kelola-jabatan-fungsional-analisis-kebijakan>

2 Alasan BSKDN Kemendagri Merumuskan Desain Tata Kelola JFAK
<https://m.jpnn.com/news/2-alasan-bskdn-kemendagri-merumuskan-desain-tata-kelola-jfak>

Tabel 10. Rilisn Artikel di beberapa Platform Media Online



4. *Place*

- a. Kantor Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya No. 132 Jakarta Pusat
- b. Orchardz Hotel Industri, Jl. Industri Raya No.8, RT.17/RW.3, Gn. Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat



Gambar 22. Tim Efektif

5. *Customer*

Target market sebagai *customer* proyek perubahan ini adalah seluruh PNS yang mengampu jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berjumlah 431 orang.



Gambar 23. PNS Pengampu JFAK di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

C. Pemberdayaan Organisasi Pembelajar

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29 Tahun 2022 tentang Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri terdiri atas:



Gambar 24. Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Desain Tata Kelola JFAK

1. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 821.29 Tahun 2022 tentang Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



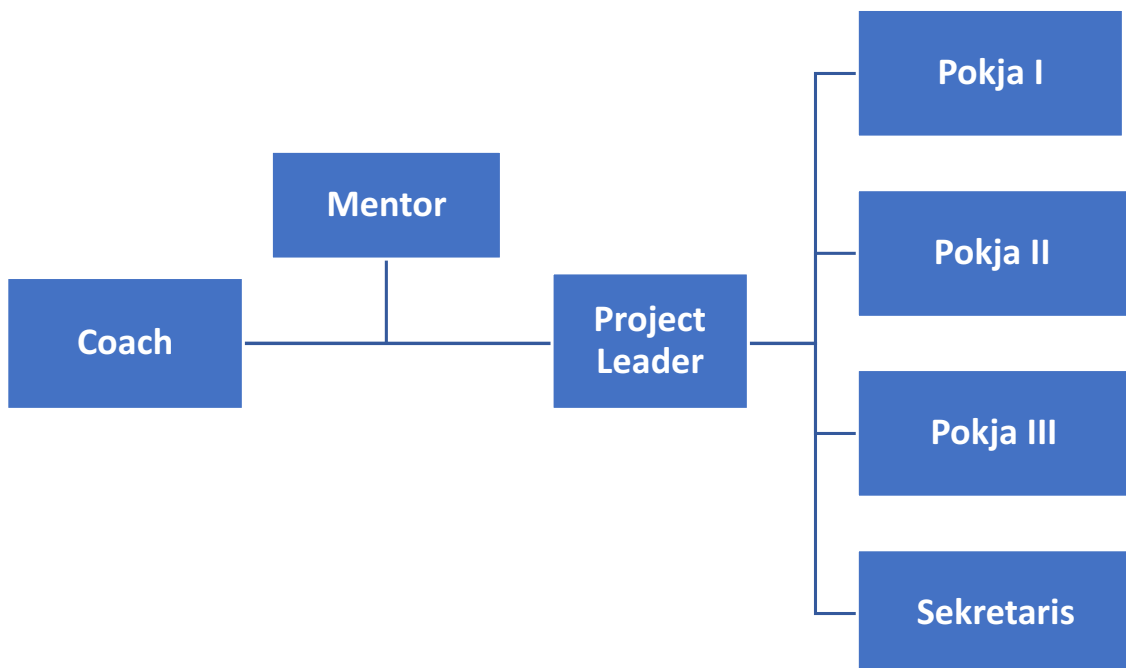
Gambar 25. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif

Tim Efektif merupakan kelompok kerja yang ada dalam struktur Tim Kerja Penyusunan Proyek Perubahan Desain Tata Kelola Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang akan membantu project leader dalam melakukan pelaksanaan dari persiapan hingga tercapainya kemanfaatan proyek perubahan sesuai dengan tahapan yang direncanakan. Susunan Tim Efektif terdiri dari:



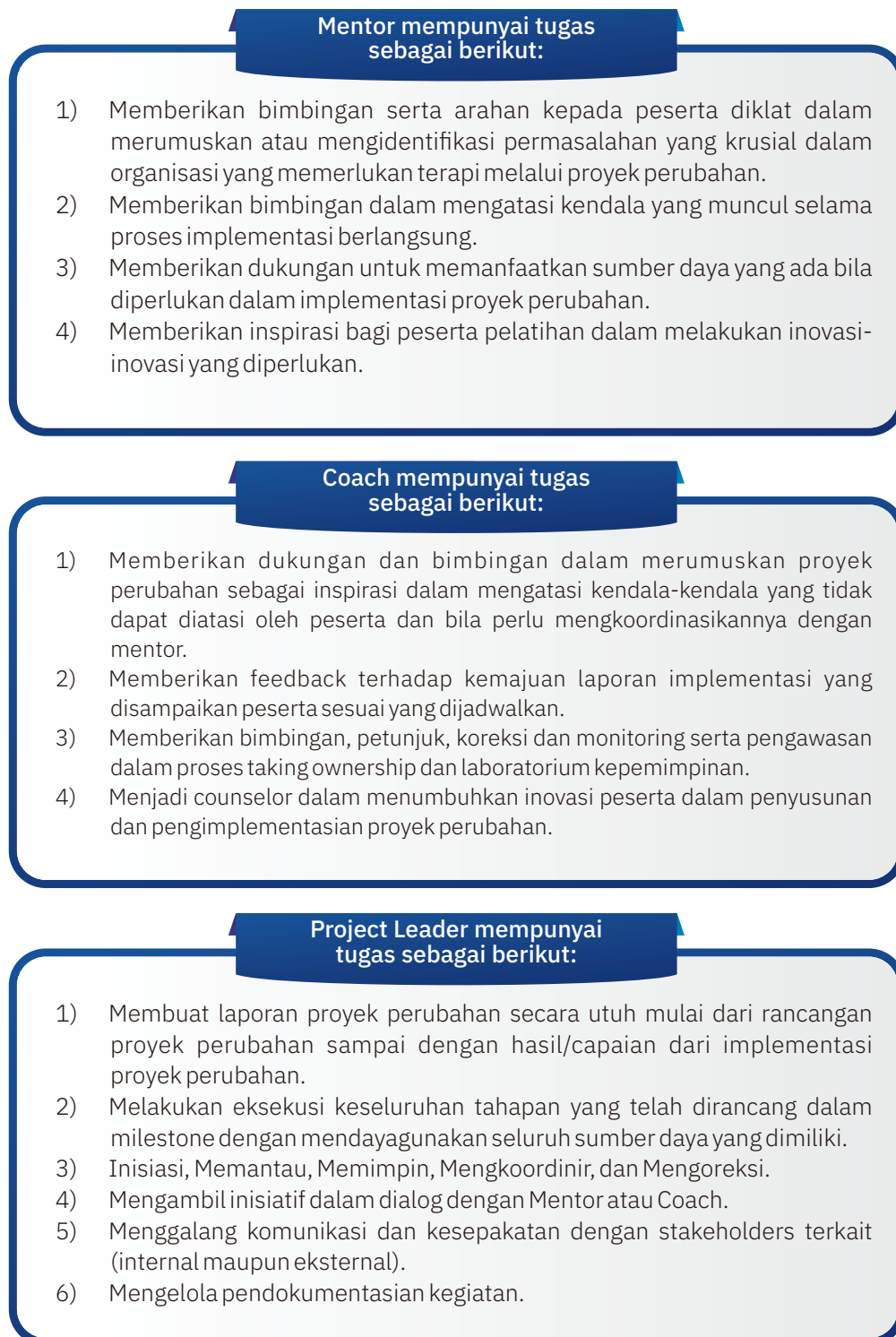
Gambar 26. Struktur Tim Efektif

2. Struktur Tata Kelola Proyek Perubahan



Gambar 27. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif

Proyek perubahan dikelola dengan koordinasi yang intensif antara Mentor, Coach, Project Leader dan didukung oleh Tim Kerja untuk pelaksanaan teknis dan administratif. Secara skematis hubungan unsur-unsur terkait dalam pengelolaan proyek digambarkan sebagai berikut:



Tabel 11. Struktur Organisasi Pelaksana dan Tim Efektif

3. Tugas dan Kewenangan Tim Efektif

Sekretaris mempunyai Tugas dan Kewenangan:

- 1) Membantu Ketua menyusun dokumen kegiatan.
- 2) Membantu Ketua mengoordinasikan kegiatan.
- 3) Menyiapkan bahan rapat dan laporan kegiatan.

Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Desain Tata Kelola:

- 1) Melakukan penelusuran dokumen kebijakan jabatan fungsional.
- 2) Melakukan studi banding dengan Kementerian/Lembaga yang telah menerapkan mekanisme kerja jabatan fungsional.
- 3) Menyusun rancangan Desain tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 4) Melakukan simulasi rancangan Desain tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 5) Melaporkan hasil penyusunan rancangan Desain tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Naskah Kebijakan:

- 1) Menyusun draft Rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Desain tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Melakukan konsultasi publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Melakukan koordinasi dengan Biro hukum.
- 4) Melaporkan hasil penyusunan rancangan naskah kebijakan Desain tata Kelola Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Kelompok Kerja Publikasi dan Dokumentasi:

- 1) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan publikasi, pers, dan media.
- 2) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendokumentasian.

Tabel 12. Struktur Tugas dan Kewenangan Tim Efektif

BAB IV PENUTUP

A. Lesson Learned

1. Penguatan Kapasitas Manajemen

Mengelola organisasi berbasis matriks yang merupakan hasil kebijakan penyetaraan jabatan, memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, sehingga para manajer/pimpinan perlu dilengkapi dengan pengetahuan/keterampilan yang relevan.

2. Pengembangan Kapasitas Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan

Hilangnya hierarki membuat berkurangnya review berjenjang, sehingga organisasi perlu memberi perhatian lebih pada kompetensi jabatan fungsional analisis kebijakan.

3. Penyesuaian Ekosistem kelembagaan

Proses penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan secara komprehensif antara lain dengan penyesuaian beberapa perangkat organisasi, meliputi: Naskah Dinas Elektronik, penghitungan Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Manajemen Talenta, Pengelolaan Kinerja, Pola Mutasi, Pola Karir, dsb.

4. Internalisasi Budaya

Perangkat organisasi & budaya Kerja perlu terinternalisasi dengan baik ke seluruh elemen unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

5. Koordinasi Dengan Instansi Pembina Nasional

Perlu proses komunikasi & audiensi intens untuk memastikan kebijakan Lembaga Administrasi Negara sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara selaras dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

B. Kesimpulan

1. Dalam melakukan suatu perubahan, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh suatu organisasi, yaitu mengetahui apa kebutuhan dari perubahan itu, perencanaan yang matang, dan dukungan dari lingkungan baik internal maupun eksternal. Lingkungan internal harus diyakinkan pentingnya perubahan dilaksanakan. Dukungan dari luar organisasi juga akan sangat membantu dalam proses Transformasi Kelembagaan. Kegagalan transformasi kelembagaan yang dilakukan sektor publik seringkali dikarenakan memaksakan suatu metode untuk semua model yang tidak sesuai dengan karakteristiknya. Maka dari itu, suatu organisasi harus benar-benar mengenali dirinya sendiri dan paham keunikan apa yang ada dalam strukturnya.

2. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan potensi yang perlu dioptimalkan, melalui pengelolaan secara komprehensif baik dalam aspek administrasi, penilaian angka kredit, karier, hingga penguatan kompetensi. Pengelolaan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat peran analis kebijakan, sehingga pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri lebih efektif.
3. Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri berupaya mengambil peran merumuskan tata kelola jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan penyederhanaan birokrasi yang bukan hanya sekadar menyederhanakan struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional.
4. Penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.
5. Desain tata kelola JFAK diharapkan dapat menjawab tantangan organisasi untuk menjadi lebih adaptif guna membangun kualitas strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri. Adapun muatan materi desain tata kelola JFAK di lingkungan Kemendagri ini meliputi tugas pokok dan kedudukan, uraian kegiatan, standar kompetensi jabatan, penyusunan rencana kerja unit, penugasan pejabat fungsional analis kebijakan, pemantauan dan evaluasi penugasan, pembentukan kelompok kerja, penunjukkan unit kerja Eselon I (UKE I) sebagai koordinator atau unit pembina JFAK, tim penilai angka kredit, penilaian kinerja dan penetapan angka kredit, pembina karier, serta kode etik.

C. Saran

1. Dalam Penyusunan Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk. II yang bersifat menghasilkan produk strategis, menurut saya bukan hanya wajib merumuskan kebijakan yang baru tetapi dapat melakukan review atau evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.
2. Produk dari Proyek Perubahan kiranya dapat diberikan pilihan berupa rumusan kebijakan atau analisis/kajian kebijakan berupa policy paper.
3. Sebaiknya sebelum memasuki jadwal pelatihan, kiranya peserta sudah membawa rancangan proyek perubahan untuk dapat dikonsultasikan dengan Coach, mengingat terbatasnya waktu efektif penyelesaian proyek perubahan yang singkat terhitung 2 (dua) bulan.
4. Jadwal pelatihan diharapkan menggunakan metode klasikal agar peserta dapat konsentrasi secara penuh mengikuti pembelajaran.

LAMPIRAN

https://bit.ly/LAMPIRAN_PROPER_ABAS_SUPRIYADI

